

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM
(UED-SP) MITRA USAHA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA TANAH DATAR
KECAMATAN KUNTO DARUSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru

Oleh

TRIYA LESTARI
NPM. 167110144

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Triya Lestari**
NPM : **167110144**
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu

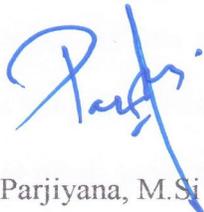
Format sistematika pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji komprehensif.

Pekanbaru, Maret 2021

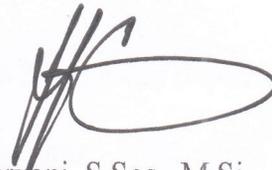
Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Publik

Pembimbing I Program



Drs. Parjiyana, M.Si



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Triya Lestari**
NPM : **167110144**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Jenjang Pendidikan : **Sarjana (S.1)**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas setra Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2021

Pelaku Pernyataan,



Triya
Triya Lestari

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu”**.

Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti seminar skripsi di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang setiap saat sabar dalam memberikan pengertian sehubungan dengan kendala yang ditemui dalam penulisan skripsi ini, juga terhadap orang tua saya yang setiap saat memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi., MCL yang telah menerima dan memberi kesempatan saya untuk dapat menimba dan menuntut ilmu di Universitas yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos.,M.Si yang menyediakan fasilitas

dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di fakultas yang beliau pimpin.

3. Bpk. Drs. Parjiyana., M.Si bertindak sebagai Dosen Pembimbing 1 yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lali dalam menyelesaikan skripsi ini serta dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada kedua Orang Tua saya yang paling saya cintai ayahanda Sukardi dan Ibunda Sugianti yang telah memberikan dukungan moril dan semangat yang tiada tara kepada saya.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat menulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Serta Perpustakaan Universitas Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.

8. Teman-teman seperjuangan program studi Administrasi public. Terima kasih karena telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada skripsi ini, kepada Bapak/Ibu/ Saudara yang membaca skripsi ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Tuhan kita menyembah dan memohon pertolongan.

Amin

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis,

Triya Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Adminitrasi	13
2. Konsep Kebijakan Publik	18
3. Konsep Organisasi	19
4. Manajemen	23
5. Konsep Kemiskinan	26
6. Konsep Pelaksanaan	26
7. Konsep Pelaksanaan Kebijakan	29
8. Indiaktor Pelaksanan	32
B. Kerangka Pemikiran	34
C. Hipotesis	34
D. Konsep Operasional	35
E. Operasional variabel	37
F. Teknik Pengukuran	38

BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Penarikan Sampel	43
E. Jenis Dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	46
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Rokan Hulu	47
1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu	47
2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu	48
B. Tinjauan Umum tentang Kecamatan Kunto Darussalam	52
C. Tinjauan Umum tentang Desa Tanah Datar	53
D. Tinjauan Umum tentang (UED-SP) Mitra Usaha	55
1. Profil (UED-SP) Mitra Usaha	55
2. Asas dan Tujuan (UED-SP) Mitra Usaha	56
3. Struktuk Organisasi (UED-SP) Mitra Usaha	57
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	60
1. Jenis Kelamin Responden	60
2. Tingkat Pendidikan	61
3. Tingkat Umur Responden	62
B. Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalarn Kabupaten Rokan Hulu	63
1. Standar dan sasaran kebijakan	64
2. Sumberdaya	68
3. Hubungan antar organisasi	71
4. Karakteristik agen pelaksana	75
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi	78
6. Disposisi implementor	81
7. Rekapitulasi Tanggapan Respoonden terhadap Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalarn Kabupaten Rokan Hulu	85

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.....	87
--	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR KEPUSTAKAAN



DAFTAR TABEL

Table	Halaman
I.1	Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) di Kabupaten Rokan Hulu..... 3
I.2	Jumlah dan Jenis Usaha Yang Dikelola dari Hasil Pinjaman UED-SP Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu..... 8
1.3	Laporan Perkembangan Pinjaman UED-SP Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 8
1.5	Jenis Usaha Penungak Pinjaman Dana Pada UED-SP Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu..... 8
1.5	Rangkuman Informasi Laporan Keuangan UED-SP di Desa Tanah Datar Tahun 2020) 9
2.1	Operasional Variabel..... 36
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian..... 42
3.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 43
5.1	Jenis Kelamin Responden..... 61
5.2	Tingkat Pendidikan Responden 61
5.3	Tingkat Umur Responden..... 46
5.4	Tanggapan Anggota Mengenai standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan 65
5.5	Tanggapan Anggota Sumberdaya 69
5.6	Tanggapan Anggota Mengenai Indikator Hubungan Antar Organisasi 72
5.7	Tanggapan Anggota Lapangan Mengenai Indikator Karakteristik Agen Pelaksana..... 75
5.8	Tanggapan Anggota Mengenai Indikator Kondisi sosial, politik, dan ekonomi..... 79
5.9	Tanggapan Anggota Mengenai Indikator Disposisi Imlementor..... 82
5.10	Rekapitulasi Tanggapan Respoonden terhadap Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu..... 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner untuk Anggota

Lampiran 2. Wawancara untuk Kepala Desa (Kades)

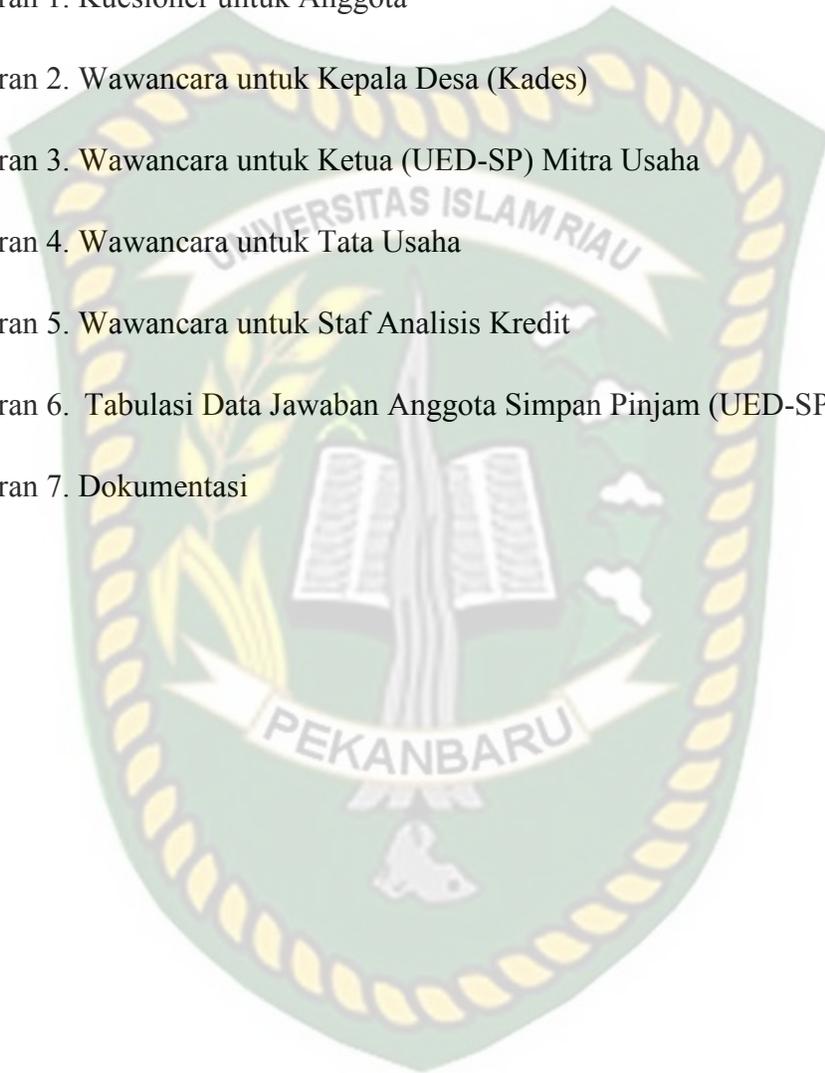
Lampiran 3. Wawancara untuk Ketua (UED-SP) Mitra Usaha

Lampiran 4. Wawancara untuk Tata Usaha

Lampiran 5. Wawancara untuk Staf Analisis Kredit

Lampiran 6. Tabulasi Data Jawaban Anggota Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha

Lampiran 7. Dokumentasi



**PELAKSANAAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)
MITRA USAHA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN
KUNTO DARUSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Triya Lestari

Kata Kunci: Rakan niaga Simpanan dan Pinjaman Perniagaan Ekonomi Desa (UEDSP);

Kajian ini bertujuan untuk menentukan pelaksanaan rakan niaga dalam ekonomi desa untuk simpanan dan pinjaman (UED-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Tanah Datar, kecamatan Kunto Darusalam, kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui halangan faktor pelaksanaan rakan niaga dalam Simpanan dan Pinjaman Ekonomi Desa (UED-SP) .Meningkatkan Ekonomi Komuniti di Desa Tanah Datar, Kabupaten Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu. Petunjuk untuk menilai pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpanan dan Pinjaman Rakan Perniagaan (UED-SP) merangkumi standard dan objektif dasar, sumber daya, hubungan antara organisasi, ciri-ciri ejen pelaksana, keadaan sosial, politik dan ekonomi, dan pelaksana pelaksana. Kaedah kaedah deskriptif kualitatif yang menerangkan peristiwa yang berlaku. Penyelidikan dilakukan di Desa Tanah Datar, Kabupaten Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu. Terdapat 5 populasi dan sampel dalam kajian ini, iaitu Ketua Desa 1 orang dan Ketua (UED-SP) Rakan Perniagaan berjumlah 1 orang, kemudian Pentadbiran 1 orang, 1 orang staf analisis kredit, Anggota yang membuat pinjaman pada tahun 2020 44 orang sebagai sampel yang berada dalam temu ramah tersebut. Teknik yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah teknik banci, yaitu seluruh populasi yang digunakan sebagai sampel kajian dengan alasan jumlahnya agak kecil dan berada di satu tempat, sementara bagi Anggota yang membuat pinjaman pada tahun 2020 menggunakan teknik persampelan insidental, yaitu memilih sampel pada masa-masa tertentu di lokasi penyelidikan dengan alasan jumlah responden yang besar. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri daripada data primer yang dikumpulkan dengan kaedah soal selidik dan senarai temu ramah dan data sekunder menggunakan teknik pemerhatian. Analisis data dalam kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, iaitu menerangkan dan meringkaskan keadaan pemboleh ubah situasi yang ada pada objek kajian, berdasarkan analisis ini, pengkaji menyimpulkan bahawa pelaksanaan Penjimatan Usaha Ekonomi Desa dan Rakan Perniagaan Pinjaman (UED-SP) berada dalam kategori Saran Terlaksana yang perlu dipertimbangkan, terutama mengenai pengawasan dan calon pelanggan yang seharusnya diberi pinjaman, dan yang seharusnya tidak diberikan pinjaman.

ECONOMIC BUSINESS IMPLEMENTATION OF THE SAVINGS AND LOAN VILLAGE (UED-SP) BUSINESS PARTNERS IN IMPROVING COMMUNITY ECONOMY IN VILLAGE TANAH DATAR DISTRICT KUNTO DARUSALAM DISTRICT ROKAN HULU

ABSTRACT

Triya Lestari

Keywords: Village Economy Trade Loan and Savings Trade Partners (UEDSP)

This study aims to determine the implementation of trade partnerships in the village economy for savings and loans (UED-SP) in improving the economy of the community in Tanah Datar village, Kunto Darusalam sub-district, Rokan Hulu district and to find out the constraints of trading factors in Village Economic Savings and Loans. (UED-SP). Improving the Community Economy in Tanah Datar Village, Kunto Darusalam Regency, Rokan Hulu Regency. The guidelines for assessing the implementation of the Village Economic Business Enterprises Savings and Commercial Partnership Loans (UED-SP) include basic standards and objectives, resources, relationships between organizations, characteristics of the executing agency, social, political and economic conditions, and executors. Qualitative descriptive methods that explain prevailing events. The investigation was carried out in Tanah Datar Village, Kunto Darusalam Regency, Rokan Hulu Regency. There are 5 populations and samples in this study, namely the Head of the Village 1 person and the Chairperson (UED-SP) of the Commercial Partnership, amounting to 1 person, then 1 person in charge, 1 staff of credit analysis, Members who made loans in 2020 44 people as the sample. are in such a friendly meeting. The technique used in this investigation is the sissy technique, which is the entire population used as the study sample on the grounds that the number is rather small and in one place, while members who make loans in 2020 use the incidental sampling technique, which is selecting samples at times. at the location of the investigation by reason of the large number of respondents. Types and data collection techniques consisted of primary data collected by means of search and friendly encounters and secondary data using observational techniques. Data analysis in this study is to use qualitative methods with descriptive analysis techniques, namely to explain and summarize the circumstances of the situation in the object of study, based on this analysis, the reviewer concludes that the implementation of Village Economic Business Savings and Business Loans (UED-SP) is in the Implemented Advice category that needs to be considered, especially regarding supervision and potential customers who should be given a loan, and who should not be given a loan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi merupakan suatu istilah yang sangat umum dan mencakup semua bidang kehidupan manusia. Manusia makhluk social, sehingga membutuhkan orang lain karena tidak mampu menjalankan seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan dan pencapaian seorang diri. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Didalam mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah suatu organisasi, organisasi adalah sesuatu yang didirikan sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karena itu organisasi tersebut harus mengelola rangkaian kegiatan yang diarahkan guna mencapai tujuan organisasi, dalam pencapaian sebuah tujuan dalam organisasi di perlukan adanya manajemen, yang merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan mengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

Menurut Siagian (2003:2) adminisitrasi yaitu keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah merupakan organisasi pelaksana kebijakan Negara serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya pemerintah sebagai instansi eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja sama dalam lingkup pemerintahan yang kita sebut administrasi Negara antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan Negara yang telah tetuang dalam undang-undang 1945.

Sebagai salah satu akibat dari luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ikut luasnya kekuasaan pemerintahan yang harus di jalankan. Sebagai konsekuensi luasnya kekuasaan pemerintahan, maka dalam penyelenggaraan di perlukan suatu system pemerintah yang dapat menerapkan kekuasaannya sampai ke daerah-daerah. Pemerintah yang secara langsung berhubungan erat dengan masyarakat, dalam ini wilayah pedesaan.

Prabawa Utama (dalam Awang, 2006:30) menegaskan adanya pemerintah daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya. Sebaliknya pemimpin daerah akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien. Disamping itu daerah dengan populasi yang *relative homogeny* akan lebih berpeluang untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan di wilayah tertentu.

Dalam konteks otonomi, otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut di peroleh suatu daerah melalui penyerahan urusan pemerintahan pusat atau daerah tingkat atasnya (via desentralisasi), sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan. Dalam membicarakan otonomi, desa menjadi bagian tak terpisahkan. Secara umum desa dapat diartikan sebagai “Sendi Negara”, sendi masyarakat, dan sendi masyarakat untuk dijadikan sandi Negara, fundamen negara, sumber kehidupan negara keseluruhannya, tiang-tiang negara, soko guru yang kuat bagi segala macam pembangunan mencerminkan betapa pentingnya arti keberadaan desa.

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang belum mampu dihilangkan dari Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data statistik Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah. Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganan yang didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin. Berikut ini jumlah RTM di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu:

Tabel 1.1 :Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk di Tahun 2020	Jumlah RTM
1	Rokan IV Koto	26 433	1352
2	Pendalian IV Koto	13 036	804
3	Tandun	34 701	2299
4	Kabun	30 979	1496
5	Ujung Batu	80 909	753
6	Rambah Samo	39 800	2626
7	Rambah	59 786	2133
8	Rambah Hilir	46 067	423
9	Bangun Purba	19 822	1146
10	Tambusai	76 500	1050
11	Tambusai Utara	118 522	2486

12	Kepenuhan	33 690	3900
13	Kepenuhan Hulu	21 894	989
14	Kunto Darussalam	68 865	1200
15	Pagaran Tapah Darussalam	19 172	994
16	Bonai Darussalam	28 145	2801

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

Program pemerintah provinsi riau bagi masyarakat lapisan bawah melalui program pemberdayaan desa (PPD).Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah provinnsi riau bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota yaitu melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat yaitu disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah lembaga keuangan mikro (LKM). Program ini merupakan bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Kegiatan UED/K-SP berkonsentrasi pada pemberian pinjaman dana usaha pada masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan lainnya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 Permendagri Nomor 6 Tahun 1998. Adapun bunyi Pasal 5 Permendagri sebagai berikut:

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/kelurahan sebagai anggota UED-SP.

- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditanlainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

UED-SP Mitra Usaha yang berada di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan bantuan dana usaha melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha desa.

Bentuk nyata program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini adalah untuk memihak dan melayani masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari kantor UED-SP di Desa Tanah Datar untuk kebun, dagang dan jasa. Anggota UED-SP dalam meminjamkan dana harus membawa agunan yang merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga UED-SP.

Namun orang yang bisa memanfaatkan dana tersebut adalah orang yang memiliki jaminan harta benda untuk dijadikan jaminan atau masyarakat ekonomi menengah dan menengah keatas yang relatif tinggi menjadi anggota UED-SP dibandingkan masyarakat miskin. Program Peminjaman, didalam UED-SP Mitra di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sendiri juga membentuk suatu kegiatan perkreditan atau peminjaman yang memakai bunga ringan. Hal tersebut yang membuat para anggota yang ikut serta dalam pinjaman merasa lebih ringan dan percaya diri mampu dalam meningkatkan usaha mereka. Peminjaman yang dilakukan anggota akan mendapatkan bunga peminjaman yaitu sebesar 1.5%. Sistem simpan pinjam UED-SP Mitra di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan system

angunan salah satunya adalah jaminan BPKB kendaraan. Namun walaupun sudah dijelaskan tentang beberapa prinsip tersebut tetap saja ada beberapa anggota yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.

Tabel 1.2 Jumlah dan Jenis Usaha Yang Dikelola dari Hasil Pinjaman UED-SP Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Jenis Usaha	Orang	Rupiah
Perdagangan (D)	15	15.000.000
Pertanian (T)	0	0
Perkebunan (K)	17	18.000.000
Perikanan (I)	0	0
Peternakan (Tr)	0	0
Industri Kecil (Ik)	0	0
Jasa (J)	73	75.500.000
Jumlah	105	108.500.000

Sumber : Laporan UED-SP Desa Tanah Datar, Tahun 2020

Tabel 1.3 Laporan Perkembangan Pinjaman UED-SP Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Jumlah Peminjam		Peminjam Lunas	Peminjam Belum Lunas	Jumlah Tungakan
	L	P			
2020	45	60	92	13	5.881.400

Sumber : Laporan Keuangan UED-SP Desa Tanah Datar, Tahun 2020

Tabel 1.4 Rangkuman Informasi Laporan Keuangan UED-SP di Desa Tanah Datar Tahun 2020)

Aktiva	Jumlah
Kas	150.840.000
Bank	845.514
Piutang usaha pinjaman	1.092.167.100
Kendaraan	18.400.000
Inventaris kantor	57.175.000
Akumulasi penyusutan	64.359.622
Nilai Buku	11.215.378
Jumlah	1.255.067.992
Passiva	
Hutang Simpanan	187.930.667
Biaya yang masih harus dibayar	5.114.999
Jumlah	193.045.666

Sumber : Laporan Keuangan UED-SP Desa Tanah Datar, Tahun 2020

Permasalahan di atas menunjukkan tingginya jumlah dana tunggakan yang belum dibayarkan oleh peminjam, hal ini menunjukkan masih dibutuhkan pendampingan dan sosialisasi kemasyarakat tentang kapasitas UED-SP Mitra Usaha dalam program usaha simpan pinjam (USP) sehingga setiap kapasitas di UED-SP dapat terlaksana dengan baik dan dampaknya setiap tunggakan para peminjam dapat dikurangi atau dilunasi dengan tepat waktu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kasus UED-SP Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa permasalahan atau fenomena sebagai berikut:

1. Yang meminjam tidak digunakan sebagaimana mestinya dan hasil pinjaman yang diperuntukan untuk modal usaha serta factor masyarakat sebagai petani yang kehidupannya bergantung pada hasil tani akibatnya tidak selalu berjalan dengan baik sehingga terjadi penungakan.
2. Masih ditemui kelalain pada pengurus UED-SP Mitra Usaha Didesa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu yaitu dalam pelaksanaanya terdapat tidak adanya pengawasan pada desa Tanah Datar, serta kurangnya perhatian dari pihak terkait terhadap masalah-masalah yang ada kaitanya dengan UED-SP Mitra Usaha Didesa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan fenomena yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan usaha ekonomi desa simpan pinjam kemudian mendeskripsikannya **“Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang bahwa Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini adalah: **“Bagaimana Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu”?**

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Berdasarkan hal tersebut tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan baik itu dari sudut pandang teoritis/akademis beserta kegunaan praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis dan Akademis

Dari kegunaan teoritis/akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebuah aturan yang ingin diimplementasikan serta dapat menjadi bahan masukan mereka yang berminat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbedah dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk mengambil langkah tepat, guna meningkatkan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Administrasi sebagai

suatu proses kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi melalui kerja sama antar personal yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu institusi atau lembaga tertentu.

Definisi Administrasi menurut Sondang P. Siagian (2003;2), administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukannya organisasi yaitu sebagai wadah atau tempat dalam melangsungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam Zulkifli (2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Zulkifli (2005:20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrument yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrument tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapai. Menurut Wirman Syafri (2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry Fayol dalam Zulkifli, 2005;71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisien yang tinggi.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk

- member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau menejer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggung jawab, baik bagi yang member maupun yang menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab perlu untuk dipertimbangkan.
3. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak di dalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
 4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
 5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.
 6. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) diatas kepentingan pribadi (subordination of individual to general interest). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
 7. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya harus adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
 8. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggung jawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (top manager). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, atau dipusatkan.
 9. Skala hierarki (*scala chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
 10. Tata tertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.
 11. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
 12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
 13. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja ddi dukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
 14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitikberatkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

Menurut John A. Vieg dalam Fritz Morstein Max (1959) menyebutkan bahwa “dalam arti yang sederhana, administrasi ialah tindakan yang ditetapkan untuk maksud yang disadari” (Dalam Wirman, 2012;8)

Menurut Atmosudirdjo (da dalam Zulkifli, 2005;10) merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yaitu:

1. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
2. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan status yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (purpose) dan tujuan-tujuannya (goals), usahanya, sumber pendanaannya (financial resources), serta langkah-langkah yang akan di tempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh Administrator.
4. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
5. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Menurut Leonard D.White mengatakan bahwa administrasi ialah proses yang selalu terdapat setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau muliter, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yakni sebagai berikut: administrasi adalah proses (rangkaiian kegiatan) dan proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok (dalam wirman syafri, 2012;9).

Menurut The Liang Gie (dalam Syafril, 2012;14), administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam persfektif proses.Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut sebagai berikut:

1. Organisasi (tata keragaan)
2. Manajemen (tata pimpinan)
3. Komunikasi (tata hubungan)
4. Informasi (tata keterangan)
5. Personalia (tata kepegawaian)
6. Finansia (tata keuangan)
7. Material (tata pembekalan)
8. Relasi publik (tata humas)

Pemerintah menjalankan tugas kerjasama untuk mencapai sasaran pembangunan melalui aparatur pemerintahan, jadi dalam hal ini perlu administrasi yang dimaksud atas pemerintah dan masyarakat.

2. Konsep Kebijakan Publik

Dalam proses pelaksanaan tujuan negar Indonesia tentu memerlukan yang namanya kebijakan publik, dengan kebijakan publik negara akan dijalankan sesuai dengan perturan-peraturan dan kesepakatan yang dirumus oleh pihak berwenang. Banyak para ahli yang mengeluarkan pendapat mereka mengenai kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, yang disampaikan oleh Elau dan Prewit (dalam Agustino, 2016:17) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Sementara itu, Aderson (dalam Agustino, 2006:17) mendefenisikan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan publik dapat menyelesaikan masalah negara, yang diungkapkan Theodoulou (dalam Agustino, 2016:18) kebijakan publik mestinya dapat menyelesaikan

konflik atas kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya. Ini semua harus dilakukan oleh kebijakan publik, karena inilah tugas penting dari sebuah negara.

3. Konsep Organisasi

Organisasi sebagai wadah sekumpulan manusia yang bekerjasama secara rasional dalam menjalankan kegiatan administrasi dan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Organisasi sebagai wadah bersifat statis sedangkan organisasi sebagai rangkaian interaksi manusia bersifat dinamis yaitu terus bergerak dan berkembang mengarah ke arah yang lebih baik.

Menurut Sondang P. Siagian (2003,6), organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang /keompok orang yang disebut bawahan. Definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Konsep organisasi (organization) nampaknya merupakan titik sentral dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Bahwa keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. (Zulkifli, 2009;15)

Menurut Zulkifli and Nurmasari (2015;99) organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti badan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat ,dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Zulkifli and Nurmasari (2015;99) Unsur-Unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu:

1. Adanya tujuan bersama
2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih
3. Adanya pembagian tugas
4. Adanya kehendak untuk bekerja sama.

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat di pandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti yang dikemukakan siagian (2003;96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Menurut Zulkiifli (2005;131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin mengindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang dating dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan di akhiri dengan pengevaluasian

pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan poses antara lain tergambar dalam pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2005:16). Yaitu organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Seperti halnya administrasi, organisasi juga merupakan salah satu fenomena social masyarakat modern. Melalui organisasi, orang dapat memenuhi dan mencapai berbagai kebutuhan dan tujuannya. Oleh karena itu, akan dijumpai beragam prinsip yang mereka pegang dalam memanfaatkan organisasi sebagai alternative alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005;39) merumuskan prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya (*efforts*) kerjasama yang teratur dan kontinu antara orang-orang yang bersangkutan. Prinsip ini membawa konsekuensi, bahwa harus ada kesatuan pimpinan (*unity of command*) dan kesatuan arah gerak (*unity of direction*).
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homegan. Untuk terarahnya pencapaian tujuan organisasi dibutuhkan daya upaya (inisiatif) dari seluruh personil organisasi. Oleh karena itu seluruh pekerjaan harus terbagi habis menjadi keveling-keveling kerja, dan dijaga sampai ada batas-batas kaveling kerja yang tidak jelas atau tegas.
3. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan (wewenang) harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan. Artinya, luas dan beratnya tugas. Demikian pula, maka luas beratnya kekuasaan yang diberikan harus sesuai dengan luas dan beratnya tanggung jawabnya. Bila prinsip ini dilanggar, maka pasti akan terjadi berbagai perbincangan dalam berbagai macam bentuk.
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan jelas-jelasnya. Tepat orang, tepat tugas dan jelas batas-batasnya. Pedelegasian tugas dan wewenang atau kekuasaan harus jelas bagi kedua belah pihak-pihak pendelegasian dan penerima delegasi. Pelimppihan tugas dan wewenang sedapat mungkin tertulis dan dirumuskan dengan kata-kata yang jelas, mudah dipahami, menunjukkan isi materinya, dan batas-batasnya yang tegas, bilamana tidak memungkinkan tegas, maka harus disertai suatu "policy" yang memberikan pedoman untuk menilai kasus-kasus praktek.

5. Kesatuan komando atau hirarkhi (*the one man one chief principle*). Penyusunan organisasi harus mengikuti garis-garis tatabubungan bawahan atas. Semua harus komando, perintah, laporan, informasi, kerja, penfasilitasan kerja dan sebagainya, harus melalui garis-garis hirarkhi ini sebagai prinsip. Didalam praktek prinsip ini harus dipegang teguh, akan tetapi tidak boleh kaku, agar supaya tidak macet.
6. Komunikasi. Kelompok organisasi tergantung dari komunikasi, yakni pertukaran informasi antar sesama unit kegiatan yang terdapat dalam organisasi bersangkutan. Kelancaran harus dan ketepatan data dan informasi yang relevan sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat.
7. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya. Pengecekan ini bersifat organisasional. Artinya merupakan bagian integral dari pada kehidupan organisasi. Dengan demikian tidak ada pimpinan yang bisa mengontrol segala-galanya, malahan yang demikian itu mendatangkan efek yang tidak baik terhadap motivasi kerja bawahan.
8. Kontinuitas, artinya pekerjaan tidak boleh mandeg (terhenti) karena seorang berhalangan. Oleh karena itu untuk bidang kerja yang sifatnya rutinitas sebaiknya ditunjuk seorang untuk beberapa orang sebagai pelaksana jika personil yang telah ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab kerja bersangkutan berhalangan.
9. Saling asuh antara instansi line dan staf. Hal ini penting sekali terutama didalam organisasi yang sudah mulai kompleks operasinya. Yang harus dicegah adalah jangan sampai, karena berbagai hal atau sebab, suatu unit kerja merasa lebih penting atau dipentingkan diatas unit kerja lainnya.
10. Koordinasi. Prinsip ini adalah pelengkap prinsip kedua diatas, pembagian kerja menimbulkan spesialisasi, spesialisasi mempercepat peningkatan keahlian, akan tetapi mengandung bahaya desintegrasi. Untuk itu penunjukkan pelaksanaan masing-masing bidang tugas terjamin untuk bisa bekerja berdampingan. Kebijakan yang dapat mengembangkan koordinasi antara lain adalah kewajiban bertukar informasi dan bertukar pikiran setiap kali timbul masalah-masalah bersama, dan menanamkan kebiasaan untuk saling berkonsultasi satu sama lain bila menghadapi pekerjaan yang ada hubungannya dengan bidang pekerjaan unit organisasi lainnya.
11. Kehayatan, setiap personil harus memandang organisasi seolah-olah hidup (berhayat). Artinya, jika terjadi hal-hal yang membahayakan hayat organisasi, maka segera timbul inisiatif (prakarsa) spontan dari para personil untuk bertindak dan mengamankan organisasi dari bahaya dimaksud.
12. Tahu diri pada setiap warga organisasi. Prinsip ini berhubungan dengan disiplin dan prinsip pembagian kerja, tugas, tanggung jawab dan kewenangan. Setiap personil organisasi harus cukup sadar dan tahu akan posisinya didalam hirarki organisasi. Walaupun kita kadang-kadang gelisah melihat rekan-rekan melakukan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip organisasi, bahkan atasan sendiri kadang-kadang yang melakukan pelanggaran.

4. Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Haiman manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Zulkifli (2015:14) manajemen adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan bersama-sama orang lain, jadi manajemen tidak akan ada tanpa adanya kerjasama dan yang melakukan kerja sama adalah manusia. (dalam Zulkifli, 2015:514)

Menurut Nawawi (2008:41) beliau memilah-milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Unsur tujuan organisasi, yang bisa dikaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja di dalam tim.
3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan pada pekerjaan dan para manajer dan top manajer, namun jika para manajer dan top manajer lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai partner.

Menurut Sondang P. Siagian (2003:5), manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut George R. Terry (1997) menyatakan bahwa manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain (Dalam Doni J. Priansa dan Agus Garnida, 2013:29)

Menurut Stoner, et.al (1996:7) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (dalam Zulkifli, 2009;17)

Manajemen tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional seperti yang telah dikemukakan Siagian (2003:5) manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pengetahuan manajemen bukan hanya sebagai karya-karya dalam praktik nyata, tetapi dilakukannya sebagai disiplin suatu pengetahuan yang dapat dipelajari. Peter Drucker mengemukakan dua hal penting terkait dengan manajemen yaitu fungsi manajemen dan orang-orang yang melaksanakannya. Manajemen menunjukkan suatu kedudukan sosial dan wewenang, tetapi juga merupakan suatu disiplin dan bidang telaah. (dalam Doni J. Priansa dan Agus Garnida, 2013:30)

Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen tidak saja mengidentifikasi dan menganalisis, namun juga mengkombinasikan secara efektif bakat orang dan mendayagunakannya untuk mencapai

tujuan. George R. Terry (dalam D. J. Prinsa dan Agus Garnida, 2013:33) menyebut unsur manajemen dengan istilah “6M”, unsur-unsur manajemen tersebut perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien. “6M” tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja (*Men*)
Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksklusif maupun operatif.
2. Dana (*Money*)
Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Metode (*Methods*)
Cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
4. Material (*materials*)
Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
5. Mesin (*machines*)
Mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Pasar (*Market*)
Pasar untuk menjual hasil.

5. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan pendidikan dan keadaan kesehatan yang buruk. Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti yang diterapkan oleh departemen sosial, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Menurut Suparlan arti kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.

6. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu tujuan kebijakan tertentu. Tahap ini biasanya berkaitan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.

Mengingat definisi dan makna dan sifat pelaksanaan/implementasi yang dapat dipahami dan diartikan dari berbagai dimensi, maka tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikannya. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan dapat berupa proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Lester dan Stewart (2000:12), pelaksanaan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif .

Menurut James Anderson (1979:121), menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi. Proses administrasi sebagaimana diistilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada saat ini. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Implementasi atau kebijakan dipahami juga sebagai berikut, dalam Kusumanegara (2000:98:99):

- a. Proses yaitu karena didalamnya terjadi beberapa aktifitas berkelanjutan
- b. Output yaitu melihat apakah aktifitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan.
- c. Outcome yaitu akibat yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan program, yaitu apakah pelaksanaan suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979:21), menjelaskan makna pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian pelaksanaan kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diusahakannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampaknya pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Dalam Zaini Ali dan Raden Imam Al Hafis, 2015:51)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:213), mengidentifikasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Dalam Leo Agustino, 2014:139)

Pressman dan Wildavsky (1978:101) mengemukakan bahwa "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*". Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Sedangkan menurut Matland menyatakan bahwa literature mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up) kelompok dengan top-down melihat perancang kebijakan sebagai actor sentral dalam implementasi kebijakan. Selain itu kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya pada tingkat sentral atau variable yang bersifat makro. (dalam Hamdi, 2012:98)

Bottom-up menekankan pada dua hal yakni kelompok sasaran dan pemberi pelayanan. Pemberian tekanan pada dua hal tersebut menurut bottom-up didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan senyatanya dibuat pada tingkat local.

Menurut Matland (1995:153) mengembangkan suatu model kontingensi, yang disebutnya sebagai model ambiguitas. Dari keseluruhan paparan memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan yang berisi upaya untuk merubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditentukan atau ditetapkan yang secara rinci dan berjenjang dan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan berdasarkan pemahaman tersebut.

7. Konsep Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangkaian proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lainnya (Anggara, 2014:12). Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah cara yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan (Eddy Wibowo, 2005:70).

Untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan menurut Syukur ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu, 1. Adanya program atau kegiatan yang akan

dilaksanakan, 2. Target group, 3. Unsur pelaksana (Abdullah M. Syukur, 1986:396). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/ penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 3 kelompok variabel, yaitu 1. Karakteristik dari masalah, 2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang, 3. Variabel lingkungan.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan publik akan terlihat dari dampak yang terjadi dimasyarakat. Apabila dampak yang terjadi positif, dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dampak yang terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah berarti pelaksanaan tidak efektif. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bambang Sugono, yaitu: “Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian perilaku atau perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik menjadi tidak efektif”. (AG. Subarsono, 2005:70).

Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan, adapun model yang dipakai adalah Model Grindle. Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Adapun content atau isi dari sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik dipengaruhi oleh faktor yang mencakup: (Samodrwa Wibawa. 1994:21).

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerjakan.

Sedangkan dalam bentuk variabel lainnya menurut Grindle adalah lingkungan atau konteks implementasi dari sebuah program. Adapun indikator yang berpengaruh dalam lingkungan kebijakan adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Agustino (2006:153). Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. *Pertama*, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai. *Kedua*, adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan yang dapat menjadi pelaksanaan yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. “Tepat” *ketiga* adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal.

Pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak. Keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan yang merupakan interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang lebih dekat.

Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari *public opinion* atau persepsi publik akan kebijakan dan pelaksana kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan pelaksana kebijakan, dan *individualis* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasikan kebijakan. Keempat “tepat” dukungan strategis dan dukungan teknis.

8. Indikator Pelaksanaan

Menurut Teori Donald S. Van meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011:99) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan atau implementasi, yakni:

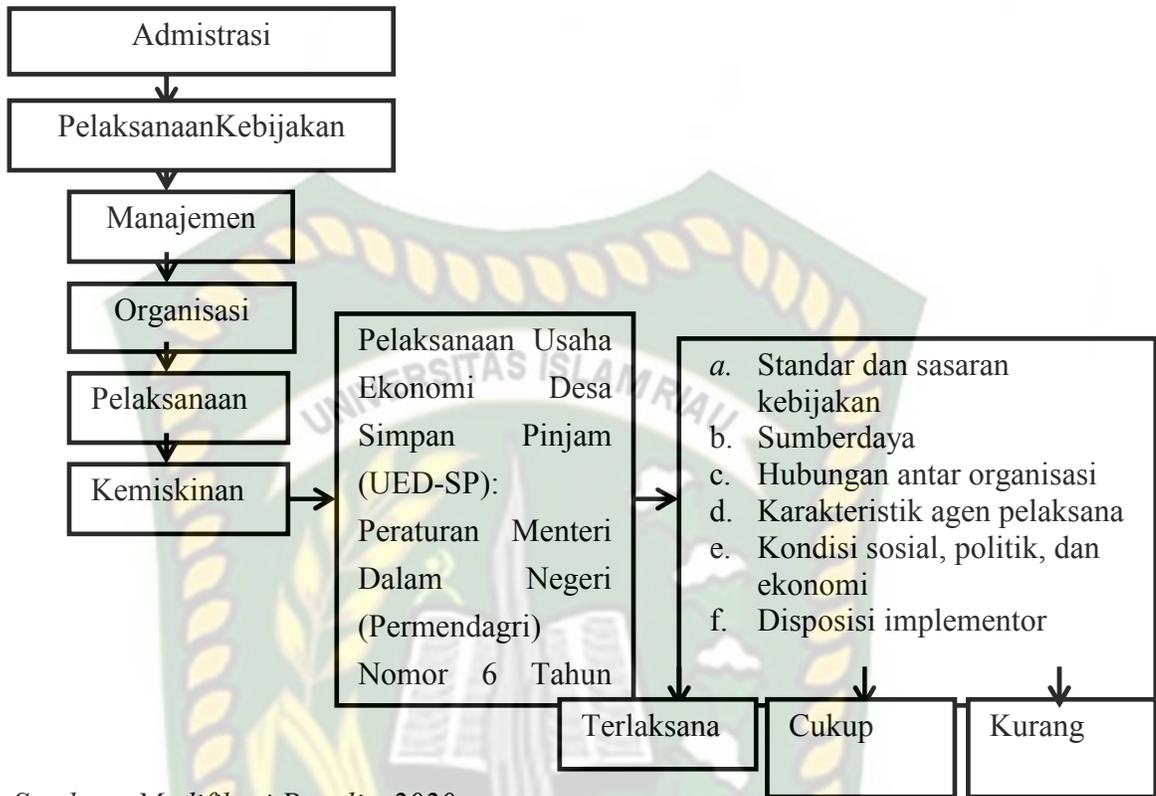
1. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
-

maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program,
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini *public* yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan,
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

B. Kerangka Pikir

Gambar I: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut: diduga masih banyak kendala dalam Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan variabel penelitian ini, maka perlu penelitian menyusun konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau kelompok orang tertentu. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis. Sedangkan dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
3. Manajemen adalah suatu proses yang digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.
4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem.
5. Pelaksanaan kebijakan implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem.

E. Operasional Variabel

Tabel 21: Operasionalisasi Variabel Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>Pelaksanaan kebijakan/ program merupakan bagian dari proses administrasi</p> <p>Proses administrasi sebagaimana di istilahkan.</p> <p>Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan</p>	<p>Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha</p>	<p>1. Standar dan sasaran kebijakan</p> <p>2. Sumberdaya</p> <p>3. Hubungan</p>	<p>a. Tepat sasaran atau tidak dalam (UED-SP) Mitra Usaha</p> <p>b. Adanya standar pelaksanaan dalam (UED-SP) Mitra Usaha</p> <p>a. Seberapa besar SDM di bagian pengawasan, tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak pada (UED-SP) Mitra Usaha. di (UED-SP) Mitra Usaha</p> <p>b. Seberapa banyak Anggota yang terlibat dalam (UED-SP) Mitra Usaha</p> <p>a. Seberapa dekat (UED-SP) Mitra Usaha dengan Anggota</p> <p>b. Adanya pengawasan yang diberikan</p>

<p>isi dan dampak suatu kebijakan (James Anderson, 1979).</p>		<p>antar organisasi</p> <p>4. Karakteristik agen pelaksana</p> <p>5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi</p> <p>6. Disposisi</p>	<p>c. Adanya peran pemangku kepentingan dalam pembentukan UED-SP) Mitra Usaha</p> <p>a. Adanya keterlibatan pengawas lapangan dengan anggota yang menungak pada (UED-SP) Mitra Usaha</p> <p>a. Adanya keterkaitan simpan pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dengan ekonomi anggota</p> <p>b. Adanya perbandingan antara umur, jenis kelamin, dan pekerjaan dalam simpan pinjam pada (UED-SP) Mitra Usaha</p> <p>c. Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan</p> <p>a. Adanya pemahaman terhadap kebijakan (UED-SP) Mitra Usaha</p> <p>b. Adanya (UED-SP) Mitra Usaha mempengaruhi anggota</p> <p>c. Adanya komitmen (Perjanjian) antara peminjam dan (UED-SP) Mitra Usaha</p>
---	--	---	--

		implementor	d. Adanya sikap untuk berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam simpan pinjam di (UED-SP) Mitra Usaha
--	--	-------------	---

Sumber : Modifikasi penelitian, 2020

F. Teknik Pengukuran

Berdasarkan pada konsep operasional di atas, maka penulis akan melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu. Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar tersebut dapat dikakatan:

a. Standar dan sasaran kebijakan:

Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

b. Sumberdaya:

Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

c. Hubungan antar organisasi:

Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

d. Karakteristik agen pelaksana:

Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi:

Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

f. Disposisi implementor:

- Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.
- Cukup Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.
- Kurang Terlaksana : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

Sedangkan untuk pengukuran variabel adalah sebagai berikut:

- Terlaksana : Input, Proses, Keluaran, Outcomes adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.
- Cukup Terlaksana : Input, Proses, Keluaran, Outcomes adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.
- Kurang Terlaksana : Input, Proses, Keluaran, Outcomes adalah pada kategori kurang baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Menurut Sugiyono (2018:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalasi*.

Djaman Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-

pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi penelitian sengaja diambil di di Desa Tanah Datar, karena desa tersebut masih ada masalah mengenai Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (dalam Sugiono, 2010:90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiono, 2010:91)

Tabel 3.1 :Jumlah Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
	Kepala Desa (Kades)	1	1	100%

2	Ketua(UED-SP) Mitra Usaha	1	1	100%
3	Tata usaha	1	1	100%
4	Staf analisis kredit	1	1	100%
5	Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020	105	44	41.9%
	Jumlah	109	48	-

Sumber: Data Olahan 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk pihak (UED-SP) Mitra Usaha adalah teknik sensus yaitu seluruh populasi yang dijadikan sampel penelitian alasan jumlah yang relative sedikit dan berada dalam satu tempat, sedangkan untuk Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 menggunakan teknik insidental sampling yaitu pemilihan sampel pada waktu tertentu dilokasi penelitian dengan alasan banyak jumlah responden.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive*

sampling. Purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi (Arikunto, 2010: 183).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2015:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:6) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara berikut:

1. Kuisisioner

Kuesioner, Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sampel dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang berupa lembaran angket atau kuesioner yang diajukan dan diisi oleh para responden yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenali informasi dan informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data penulis. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut, atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul menurut jenisnya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu melalui pendekatan kualitatif berdasarkan frekuensi tanggapan responden yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian penjelasan tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021/bulan/minggu																				
		Nov				Des				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Pembuatan soal Angket																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan laporan hasil (Skripsi)																					
9	Konsultasi revisi Skripsi																					
10	Ujian comprehensive Skripsi																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan skripsi																					

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian. letaknya sekitar 187 km dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, daHulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai).

Pada masa itu diistilahkan sebagai „ Taratak Air Hitam“ yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuu hilir dari sungai-sungai besar mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Di sekitar perbatasan Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit suku melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangga di Rokan Hulu dan bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu Sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses melayunisasi

sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh Wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera utara bersuku batak yang umumnya bekerja disektor jasa informal dan perkebunan.

Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minangkabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00 25'' derajat LU- 01025''41 derajat LU dan 1000 02'' derajat- 1000 56'' 59 derajat BT. Secara geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Utara: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara
- b. Selatan: Kabupaten Kampar
- c. Barat: Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
- d. Timur: Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Kabupaten rokan Hulu memiliki wilayah dengan luas 7.449.85 Km yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 513.500 jiwa, secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Suluk”. Di daerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu

Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam.

Secara administratif pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang kountreleur yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang Gun Pasie Pengaraian terdiri dari lima Kunco yaitu Rambah Ku, Kepenuhan Ku, Rokan Ku, dan Kunto Ku kemudian ditambah dengan Tandun Ku sehingga menjadi enam Kunco. pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing daerah Kerajaan di atas disebut Luhak. Kelima Luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada waktu itu pemerintahnya diatur melalui seorang Wedana yang berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Tahun 1987 dibentuklah pembantu Bupati Kampar Wilayah 1 yang wilayahnya sama dengan wilayah Kewedanaan Pasir pengaraian yang membawahi enam kecamatan yaitu Kecamatan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto dan Tandun, dan pada akhirnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 53 tahun 1999 yang dalam perjalannya terjadi perubahan dalam pembentukannya Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2003. sejak ditetapkannya menjadi Kabupaten secara defenitif, Rokan Hulu telah banyak mengalami kemajuan baik pembangunan maupun administrasi pemerintahan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri enam belas Kecamatan yaitu :

1. Bangun Purba
2. Kabun
3. Kepenuhan
4. Kunto Darussalam
5. Rambah
6. Rambah Hilir

7. Rambah Samo
8. Rokan IV Koto
9. Tambusai
10. Tambusai Utara
11. Tandun
12. Ujungbatu
13. Pagaran Tapah Darussalam
14. Bonai Darussalam
15. Kepenuhan Hulu
16. Pendalian IV Koto

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

Visi

“Bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya”

Misi

“Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan
2. Terciptanya lapangan kerja
3. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan di segala sektor
5. Terbukanya berbagai isolasi terutama di pedesaan
6. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan di segala sektor pembangunan
8. Berbagai fasilitas pelayanan dapat bekerja maksimal
9. Semua sektor infrastruktur terbangun maksimal mulai dari jalan, jembatan pendidikan dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum tentang Kecamatan Kunto Darussalam

Kunto Darussalam merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Kecamatan Kunto Darussalam memiliki luas $\pm 1.432.87$ km² dan jarak antara ibukota kecamatan yang berada di Kotalama dengan ibukota kabupaten yang berada di Pasir Pangaraian yaitu ± 54 km. Di Kecamatan Kunto Darussalam tepatnya di desa Kotalama terdapat Masjid Raya Darussalam yang terletak di jalan Syekh Yakin di tepi sungai Rokan, Kotalama. Dan juga terdapat bangunan yang disebut-sebut dengan Istana Kerajaan Kunto Darussalam. Masjid Raya Darussalam ini terletak di Timur Sungai Rokan, sebelah Barat lahan kosong, di sebelah Selatan Masjid terdapat bangunan setinggi dua lantai. Sementara *maintenance* masjid menghadap ke jalan raya, dan disekeliling masjid banyak terdapat makam para guru dan pemuka agama terdahulu serta panglima perang. Kecamatan Kunto Darussalam mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kepenuhan

Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo

Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Penduduk di Kecamatan Kunto Darussalam berjumlah \pm 50,398.40 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga \pm 10,079.68 Kepala Keluarga dan memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya, yaitu seperti suku Melayu, Jawa, Minang, Sunda dan Batak. Saat ini, kecamatan kunto darussalam memiliki Kode POS 28556 dan memiliki 1 Kelurahan dan 12 Desa yaitu :

1. Kelurahan Kota Lama
2. Desa Bukit Intan Makmur
3. Desa Bagan Tujuh
4. Desa Intan Jaya
5. Desa Muara Intan
6. Desa Kota Baru
7. Desa Kota Intan
8. Desa Muara Dilam
9. Desa Pasir Indah
10. Desa Kota Raya
11. Desa Pasir Luhur
12. Desa Sungai Kuti
13. Desa Tanah Datar.

C. Tinjauan Umum tentang Desa Tanah Datar

Desa Tanah Datar merupakan desa yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Pada tahun 1993 merupakan awal dari didirikannya Desa Tanah Datar yang diawali dari adanya transmigrasi yang merupakan program yang dibentuk oleh Presiden Orde Baru yaitu Soeharto yang merupakan proyek tahun 1987.

Pada tahun 1994 merupakan batas penerimaan bagi pemukiman rakyat dimana didiami oleh penduduk trans baik transmigrasi lokal maupun transmigrasi dari pulau Jawa, dimana $\pm 80\%$ berasal dari pulau Jawa sedangkan 20% lainnya berasal dari campuran, baik itu medan dan sebagainya. Saat itu Desa Tanah Datar yang bernama Desa Tanah Putih dihuni oleh warga petani PIR (Petani Inti Rakyat) yang dibina oleh KUPT dengan tanaman Kelapa Sawit.

Pada tahun 1995, dengan bimbingan KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) dibentuklah wadah ekonomi rakyat, yaitu Desa Tanah Datar dan KUD SAWITRA yang berbadan hukum nomor 1977/BH/XIII.5.7.1995 tahun 1995 dibawah naungan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dari awal berdirinya desa tersebut sampai sekarang sudah 3 kali pergantian kepala desa, yang pertama yaitu Bapak Laksono selama dua periode, kemudian Bapak Slamet Riyadi selama satu periode, dan Bapak Pardi selama dua periode, dimana periode pertama di bawah pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, dan periode kedua saat ini dibawah pemerintahan Kabupaten Kampar. Desa Tanah Datar ini memiliki tiga (3) dusun, dua belas (12) RT (Rukun Tetangga) dan enam (6) RW (Rukun Warga).

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2017 desa tersebut menjadi rebutan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk 987 jiwa yang memiliki berbagai macam suku seperti jawa, batak, melayu, sunda, dan minang. Namun 95% penduduk Desa Tanah Datar adalah suku jawa. Hampir 99% penduduk desa bermata pencaharian petani sawit. Adapun Agama di Desa Tanah Datar 95% adalah Islam, selebihnya adalah Kristen Protestan dan Kristen Katholik. Apabila dilihat dari segi wilayah desa Tanah Datar mempunyai wilayah yang berbatasan dengan :

Utara : Berbatasan dengan LC Seribu (Inti)

Selatan : Berbatasan dengan Desa Kepanasan

Barat : Berbatasan dengan Desa Intan Jaya

Timur : Berbatasan dengan PT SIP

Pada tanggal 19 November 2017 telah diadakan Pilkades di bawah pemerintahan Kabupaten Kampar. Pelantikan Kepala Desa Kampar pada tanggal 28 Desember 2017 di Kantor Kabupaten Kampar, Bangkinang. Namun pihak Kabupaten Rokan Hulu memiliki Pejabat Desa yang dimana posisinya setara dengan Kepala Desa sebagai perwakilan dari Kabupaten Rokan Hulu di Desa Tanah Datar Sp 8.

D. Tinjauan Umum tentang (UED-SP) Mitra Usaha

1. Profil (UED-SP) Mitra Usaha

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha didirikan berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada tanggal 10 April 2012. UED-SP berkedudukan di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Tanah Datar berhak menjadi anggota UED-SP apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota UED-SP. Persyaratan menjadi anggota UED-SP adalah masyarakat Desa Tanah Datar dan telah membayar simpanan pokok dan simpanan lainnya yang telah ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Desa dan bersedia mengikuti semua aturan yang ada pada UED-SP Mitra Usaha.

Setiap anggota dicatat dalam buku daftar anggota UED-SP yang ditandatangani oleh Ketua UED-SP dan diberi nomor urut. Pengelola berhak untuk memutuskan atas penerimaan atau penolakan serta pemberhentian kepada anggota dengan pertimbangan Kepala Desa, LPM, BPD dan tokoh masyarakat. pengelola memberitahukan alasan penolakan atau pemberhentian kepada calon anggota yang akan diberhentikan baik secara lisan maupun tulisan.

2. Asas dan Tujuan (UED-SP) Mitra Usaha

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Mitra Usaha berdasarkan asas kegotongroyongan yang berdasarkan pada Pancasila dengan landasan operasionalnya adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sifatnya adalah dilaksanakan dengan berlandaskan kepada keutamaan kepentingan masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Maksud dan tujuan dari pendirian usaha ekonomi desa - simpan pinjam Mitra Usaha adalah bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam yang bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Desa Tanah.

. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) menyatakan, bahwa tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk:

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sector informal untuk penterapan tenaga kerja bagi masyarakat desa.
- d. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat
- e. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintahan dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pembentukan UED-SP merupakan lembaga keuangan yang membantu masyarakat desa dalam mengelola dan menggunakan uang sesuai dengan peruntukannya, dan dibiasakan untuk menabung dan meminjam uang sesuai dengan kegunaannya agar dapat berkembang dan maju sebagaimana masyarakat di daerah yang telah maju dan berkembang terlebih dahulu.

3. Struktur Organisasi (UED-SP) Mitra Usaha

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha adalah suatu lembaga ekonomi desa yang bergerak di bidang simpan pinjam yang merupakan milik desa Tanah Datar yang diusahakan dan dikelola oleh masyarakat desa.

Lembaga UED-SP Mitra Usaha terdiri dari beberapa Tim pelaksana kegiatan yang meliputi: Otoritas Rekening, Pengawas Umum, Staf Analisis Kredit, Kader pembangunan masyarakat dan pengelola UED-SP serta tenaga pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah.

Otoritas Rekening adalah orang-orang yang berhak menandatangani penyaluran Dana Usaha Desa dari rekening Desa ke rekening UED-SP Mitra Usaha yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua LPM dan wakil perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, ditetapkan dengan keputusan desa dan disahkan oleh Bupati.

Pengawasan Umum adalah Ketua BPD dan anggotanya yang melaksanakan tugas untuk mengawasi proses penyaluran dan pengembalian dana usaha desa serta untuk memotivasi masyarakat desa untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa.

Staf Analisis Kredit adalah seseorang yang bertugas menilai kelayakan usaha calon peminjam yang dibentuk melalui pertemuan khusus yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh ketua BPD, pengelola UED-SP Cahaya, calon anggota dan pendamping desa.

Sebelum Staf Analisis Kredit melalui pertemuan khusus terlebih dahulu diidentifikasi oleh pendamping desa untuk diusulkan ke forum pertemuan khusus. Staf Analisis Kredit merupakan orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya sesuai proposal, berasal dari desa yang bersangkutan.

Kemudian masa kerja pengelola adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai berdasarkan juknis yang ada. Untuk kelancaran Dana Usaha Desa ini dibentuk Kader Pembangunan Masyarakat yang bertugas untuk mensosialisasikan Kegiatan Dunia Usaha Desa kepada masyarakat desa, membantu pendamping desa dalam memfasilitasi pertemuan/musyawarah serta membantu menyusun program kerja dan anggaran.

Kader pembangunan masyarakat dibentuk dan dipilih dalam forum musyawarah desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa melalui forum musyawarah. Tenaga pendamping adalah tenaga yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi untuk mendampingi kegiatan dana usaha desa.

Usaha Ekonomi Desa (UED)-Simpan Pinjam (SP), dikelola adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua, kasir, tata usaha dan Staf Analisis Kredit. Pengelola ditunjuk, diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah masyarakat dan disahkan oleh Bupati.



BAB V

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini meneliti permasalahan ini dengan judul; Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan responden yang terdiri dari 1 Kepala Desa (Kades) 1 Ketua (UED-SP) Mitra Usaha, 1 Tata usaha, 1 Staf analisis kredit dan 44 orang Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 semuanya berjumlah 48 orang. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada responden.

1. Jenis Kelamin Responden

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya satu golongan yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk memberi tanggapan/informasi kepada penulis lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table V.1. Jenis Kelamin Responden

<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase (%)</i>
Laki-laki	28	58.33
Perempuan	20	41.66
Jumlah	48	100

Sumber : Data Olahan penelitian, 2021

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa dari penelitian terdapat 48 responden menunjukkan bahwa penggolongan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 28 orang dan perempuan sebanyak 20 orang.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Untuk mengetahui identitas responden, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang pendidikan responden yang diambil dari sampel sebanyak 48 orang yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2: Tingkat pendidikan Responden

<i>Pendidikan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase (%)</i>
SD	12	25.0
SMP	15	31.25
SMA	10	20.83
DIII	4	8.33
SI	7	14.58
Jumlah	48	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Pada tabel V.2 dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan responden yang berpendidikan S1 yang berjumlah 7 orang atau 14.58, selanjutnya D3 berjumlah 4 orang atau 8.33%, dan SLTA berjumlah 10 orang atau 20.83% dan SLTP berjumlah 15 orang atau 31.25% dan pendidikan SD sebanyak 12 orang atau 25.0%. Dengan demikian dari tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu memberikan jawaban tentang Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

3. Tingkat Umur Responden

Berdasarkan data primer yang telah diolah maka hasil persebaran responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

Tabal V.3: Tingkat Umur Responden

<i>Usia</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase (%)</i>

17-27 tahun	20	41.66
28-38 tahun	12	25.0
39-49 tahun	11	22.91
> 50 tahun	5	10.41
Jumlah	48	100

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa dari 48 responden sebagian besar berusia 17-27 tahun dengan jumlah 20 responden, di ikuti dengan golongan usia 28-38 tahun dengan jumlah 12 responden, di ikuti dengan golongan usia 39-49 tahun dengan jumlah 11 responden sisanya adalah golongan usia > 50 tahun sebanyak 5 orang.

B. Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang belum mampu dihilangkan dari Kabupaten Rokan Hulu. Di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 1200 orang dengan keseluruhan jumlah penduduk 68865 jiwa. (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat. Usaha perekonomian Desa / Kelurahan

adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa / Kelurahan dan untuk masyarakat Desa / Kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat Desa sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) merupakan perwujudan nyata bagi upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. Program ini juga merupakan langkah pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dibidang ekonomi. Kerjasama dan koordinasi antara pendamping desa, pemerintah desa serta pihak pihak terkait sangat menentukan arah kebijakan ini, karena dengan kerjasama tujuan akan bisa terlaksana.

Dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang masalah, bahwa program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu mengalami beberapa kendala dan masalah dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, kendala maupun masalah yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang terlalu buruk terhadap pelaksanaan program namun berdampak pada efektivitas program. UED-SP Mitra Usaha adalah salah satu bagian dari program PPD yang dirancang pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian dana modal usaha untuk masyarakat desa. Untuk mengetahui efektivitas program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011: 99):

1. Standar dan sasaran kebijakan

Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dengan istilah standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan dalam pelaksanaannya, standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan adalah alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

Jika Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar mengikuti prosedur yang sesuai maka (UED-SP) Mitra Usaha Desa Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu akan cepat memprosesnya. Untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari tanggapan Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar dengan indikator standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.4: Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 di (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Mengenai Indikator standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Tepat sasaran atau tidak dalam (UED-SP) Mitra Usaha	44	0	0	44
2	Adanya standar pelaksanaan dalam (UED-SP) Mitra Usaha	37	7	0	44

Jumlah	81	7	0	88
Rata-rata	40	4	0	44
Persentase	92.0	8.0	0.0	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dengan indikator standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar yaitu 40 orang atau 92.0%, jawaban responden berkategori terlaksana kemudian 4 orang atau 8.0%, berada pada kategori cukup terlaksana, serta tidak ada yang berada pada kategori kurang terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dari aspek standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori terlaksana.

Kondisi terkait pandangan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar tentang standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha, maka penulis mewawancarai Kepala Desa (Kades) dari Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu tanggal 3 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam memproses Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dari aspek standar (kriteria) dan ketepatan sasaran kebijakan sebagai menginformasi berikut :

“Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan sudah tepat sasaran, karena sudah sesuai dengan standar pelaksanaan dalam (UED-SP) Mitra Usaha. Adapun hasil dari pinjaman tersebut hanya boleh diperuntukan pada usaha ekonomi masyarakat saja, Karena ini bersipat untuk memberikan manfaat kepada anggota masyarakat”.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Ketua (UED-SP) Mitra Usaha pada tanggal 3 Februari 2021 dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini program dapat berjalan dengan baik karena tidak lepas dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan simpan pinjam pada (UED-SP) Mitra Usaha, adapun pemangku kepentingan ialah seperti Kades, dan anggota. Juga pelaksanaan didasarkan pada ketentuan yang sudah ada, ketentuan dasar harus memenuhi criteria sebagai peminjam serta ada kejelasan misalnya kegunaan anggaran yang dipinjam untuk apa”.

Pernyataan dari Ketua (UED-SP) Mitra Usaha diatas didukung oleh hasil wawancara peneliti pada Tata usaha, adalah sebagai berikut:

“Ya itu tadi pelaksanaannya harus jelas harus tau kita anggaran itu untuk apa, serta proses peminjam dana dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh UED-SP, penyeleksian proposal peminjaman dana UED-SP dilakukan secara manual dengan cara mengecek satu persatu dokumen yang dikumpulkan”.

Senada dengan hasil wawancara peneliti kepada Staf analisis kredit yang bertugas sebagai penilaian kelayakan usaha calon peminjam, adalah sebagai berikut:

“Untuk saat ini penilaian kelayakan proposal masih dilakukan secara manual, serta syarat lain dari peminjam adalah anggota harus memiliki usaha terlebih dahulu, ada banyak anggota dengan kriteria usaha yang terbilang baru maka kita selaku pengelola UED-SP engan untuk memberikan pinjaman karena risikonya terbilang tinggi”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan kriteria dan keteapatan sasaran

kebijakan peminjam di (UED-SP) Mitra Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UED-SP, akan tetapi dengan criteria sebagai pemula dalam membuka usaha pihak (UED-SP) Mitra Usaha akan lebih berfokus kepada pengelolaa usaha yang sudah lama berdiri, hal ini disebabkan karena pihak (UED-SP) Mitra Usaha tidak ingin mengambil resiko terlalu tinggi terhadap wanprestasi atau ingkar janji.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dengan istilah sumberdaya dalam pelaksanaannya, sumberdaya adalah alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

Jika Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar mengikuti prosedur yang sesuai maka (UED-SP) Mitra Usaha Desa Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten

Rokan Hulu akan cepat memprosesnya. Untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari tanggapan Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar dengan indikator sumberdaya dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.5: Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 di (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Mengenai Indikator Sumberdaya

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Seberapa besar SDM di bagian pengawasan, tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak pada (UED-SP) Mitra Usaha.	36	8	0	44
3	Seberapa banyak Anggota yang terlibat dalam (UED-SP) Mitra Usaha	33	11	0	44
	Jumlah	69	19	0	88
	Rata-rata	35	10	0	44
	Persentase	78.4	21.6	0.0	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dengan indikator sumberdaya yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar yaitu 35 orang atau 78.4%,

jawaban responden berkategori terlaksana kemudian 10 orang atau 21.6%, berada pada kategori cukup terlaksana, serta tidak ada yang berada pada kategori kurang terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dari aspek sumberdaya Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori terlaksana.

Kondisi terkait pandangan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar tentang sumberdaya yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha, maka penulis mewawancarai Kepala Desa (Kades) dari Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu tanggal 3 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam memproses Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dari aspek sumberdaya sebagai menginformasi berikut :

“Untuk sumberdaya manusia di (UED-SP) Mitra Usaha tidak ada keluhan, berarti ini bisa dikatakan baik lah ia. Karena setau saya baik itu dari pihak pengelola (UED-SP) Mitra Usaha dari segi sumberdaya sudah sesuai dan baik dalam pelaksanaannya sumberdaya manusia sudah baik, untuk sumberdaya yang lainnya itu tergantung bagaimana pengelolaannya saja”.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Ketua (UED-SP) Mitra Usaha pada tanggal 3 Februari 2021 dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Sumberdaya manusia dalam menjalankan program sudah baik, karena sudah dibagi tugasnya dengan keahlian masing-masing, jadi tidak ada kendala sepanjang program ini berjalan”.

Pernyataan dari Ketua (UED-SP) Mitra Usaha diatas didukung oleh hasil wawancara peneliti pada Tata usaha, adalah sebagai berikut:

“Anggota yang melakukan pinjaman pada (UED-SP) Mitra Usaha dalam kurun 1 Tahun dapat mencapai 900 orang bahkan lebih, jumlah tersebut berdasarkan hasil dari laporan yang didapatkan, kembali lagi penentuan berdasarkan hasil penyeleksian proposal”.

Senada dengan hasil wawancara peneliti kepada Staf analisis kredit yang bertugas sebagai penilaian kelayakan usaha calon peminjam, adalah sebagai berikut:

“Keterbatasan dibagian pengawasan lapangan menjadi pemicu wanpretrasi anggota, ada beberapa anggota yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan yang diberikan, sumberdaya didalam (UED-SP) Mitra Usaha memang sudah memumpuni dengan keahlian masing-masing namun tidak demikian dengan pengawasan lapangan terhadap peminjam yang bandel mekakukan kewajibannya, terbilang masih minim karena dilihat dari masih banyak yang menunggak, menungaknya anggota disebabkan oleh kehidupan dan tuntutan ekonomi yang terbatas. Hal ini tidak dapat kita semunyikan karena memang keadaannya begitu dilapangan”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan sumberdaya (UED-SP) Mitra Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UED-SP, pelaksanaan dapat berjalan secara efektif apabila pihak yang merasa terlibat dapat menjalankan program lebih giat lagi untuk memberikan pengawasan yang baik.

3. Hubungan antar organisasi

Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Huludalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dengan istilah hubunga antar organisasi dalam pelaksanaanya, hubunga antar organisasidigunakan untuk mengukur keberhasilan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

(UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

Jika Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar mengikuti prosedur yang sesuai maka (UED-SP) Mitra Usaha Desa Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu akan cepat memprosesnya. Untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari tanggapan Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar dengan indikator hubunga antar organisasi dilakukan menggunakan tiga item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.6: Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 di (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Mengenai Indikator Hubungan antar organisasi

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	TK	
1	Seberapa dekat (UED-SP) Mitra Usaha dengan Anggota	34	10	0	44
2	Adanya pengawasan yang diberikan	14	4	26	44
3	Adanya peran pemangku kepentingan dalam pembentukan UED-SP) Mitra Usaha	31	13	0	44
	Jumlah	79	27	26	132
	Rata-rata	26	9	9	44
	Persentase	59.8	20.5	19.7	150

Sumber : Olahan Data Tahun 2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dengan indikator hubungan antar organisasi yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar yaitu 26 orang atau 59.8%, jawaban responden berkategori terlaksana kemudian 9 orang atau 20.5%, berada pada kategori cukup terlaksana, serta 9orang atau 19.7% berada pada kategori kurang terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dari aspek hubungan antar organisasi Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori kurang terlaksana.

Kondisi terkait pandangan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar tentang sumberdaya yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha, maka penulis mewawancarai Kepala Desa (Kades) dari Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu tanggal 3 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam memproses Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usahadari aspek hubungan antar organisasi sebagai menginformasi berikut :

“Karena ini merupakan program simpan pinjam jadi ada ikatan yang saling mengikat pada anggota dan (UED-SP) Mitra Usaha, ikatan ini dapat selesai apabila pinjaman dilunaskan. Dan setau saya anggota itu setiap tahun sangat meningkat secara drastis ia, hal ini sangat baik untuk masyarakat yaitu menumbuhkan semangat dalam berwirausaha”.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Ketua (UED-SP) Mitra Usaha pada tanggal 3 Februari 2021 dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Selalu ada jalan keluar setiap permasalahan yang ada pada program, hal ini disebabkan oleh adanya pemangku kepentingan dalam pembentukan UED-SP Mitra Usaha yang tidak lepas dari peran pemerintah Desa yang pastinya serta jajaran yang ada dibawahnya yang memberikan perhatian lebih kepada anggotanya”.

Pernyataan dari Ketua (UED-SP) Mitra Usaha diatas didukung oleh hasil wawancara peneliti pada Tata usaha, adalah sebagai berikut:

“Ada anggota beserta pemangku kepentingan serta jajaran yang ikut menyuarakan untuk menjalankan program ini, begitu juga dibagian pengawasan yang berperan penting untuk memberikan hasil akhir dilapangan atas permasalahan yang sering dijumpai atau kendala yang sering berhadapan secara tidak langsung kepada anggota adalah dibagian pengawas lapangan”.

Senada dengan hasil wawancara peneliti kepada Staf analisis kredit yang bertugas sebagai penilaian kelayakan usaha calon peminjam, adalah sebagai berikut:

“(UED-SP) Mitra Usaha ada pengawasan lapangannya, hanya belum berjalan secara efektif, pengawasan dikerahkan atau diberikan arahan untuk turun kelapangan hanya pada saat melakukan tagihan pinjaman saja”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan hubungan antar organisasi (UED-SP) Mitra Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UED-SP, pelaksanaan dapat berjalan secara efektif apabila pihak yang merasa terlibat dapat menjalankan program lebih giat lagi untuk memberikan pengawasan yang lebih.

4. Karakteristik agen pelaksana

Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas

dengan istilah karakteristik agen pelaksana, hubunga antar organisasi digunakan untuk mengukur keberhasilan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu. Jika Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar mengikuti prosedur yang sesuai maka (UED-SP) Mitra Usaha Desa Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu akan cepat memprosesnya. Untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari tanggapan Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar dengan indikator karakteristik agen pelaksana dilakukan menggunakan satu item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.6: Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 di (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Mengenai Indikator Karakteristik agen pelaksana

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Adanya keterlibatan pengawas lapangan dengan anggota yang menungak pada (UED-SP) Mitra Usaha	20	10	14	44
	Jumlah	20	10	14	44
	Rata-rata	20	10	14	44
	Persentase	45.5	22.7	31.8	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dengan indikator Karakteristik agen pelaksana dalam (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar yaitu 20 orang atau 45.5%, jawaban responden berkategori terlaksana kemudian 10 orang atau 22.7%, berada pada kategori cukup terlaksana, serta 14 orang atau 31.8% berada pada kategori kurang terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dari aspek Karakteristik agen pelaksana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori kurang terlaksana.

Kondisi terkait pandangan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datartentang sumberdaya yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha, maka penulis mewawancarai Kepala Desa (Kades) dari Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu tanggal 3 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam memproses Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dari aspek Karakteristik agen pelaksana adalah sebagai berikut :

“Ada pasti ada keterlibatan pengawasan dilapangan yaitu untuk memberikan pengawasan kepada peminjam seperti memberikan laporan terkait dengan hasil yang ditemui lapangan seperti usaha yang dimodalkan dari hasil pinjaman apakah sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan apakah usaha tersebut berjalan secara baik atau tidak serta untuk mengetahui kendala yang ada pada lapangan”.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Ketua (UED-SP) Mitra Usaha pada tanggal 3 Februari 2021 dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Ada pengawasan yang diberikan terhadap peminjam, hal ini adalah untuk melihat apakah usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan untuk mengetahui kendala penyebab terjadinya usaha atau wirausaha tidak dapat berjalan secara efektif”. Beliau juga menambahkan bahwa:

“Kegunaan pengawasan lapangan nantinya juga diberikan agar anggota dapat bekerjasama pada (UED-SP) Mitra Usaha”.

Pernyataan dari Ketua (UED-SP) Mitra Usaha diatas didukung oleh hasil wawancara peneliti pada Tata usaha, adalah sebagai berikut:

“Laporan terkait dengan kendala didapatkan dari pengawasan, pengawasan lapangan harus siap untuk diberikan pertanyaan atas hasil kinerja dilapangan, seperti si A sudah menungak namun belum ada keterangan sama sekali kelanjutannya ada di tangannya apakah pinjaman tersebut dilunaskan atau jaminan disita, hal inilah pengawasan lapangan harus tau apa penyebab si A menungak, seterusnya hasil laporan didapatkan dilapangan bahwa usaha tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah penungakan, pengawasan tadi menyampaikan bahwa pinjaman sudah terjadi penungakan. Sebenarnya sipat teguran atas penungakan dapat dilakukan secara lisan dan tulisan dan hanya ada beberapa anggota yang menungak saja kita sampaikan melalui tulisan itu tidak semuanya”.

Senada dengan hasil wawancara peneliti kepada Staf analisis kredit yang bertugas sebagai penilaian kelayakan usaha calon peminjam, adalah sebagai berikut:

“Peminjam harus bertanggungjawab terhadap penungakan yang dilakukan, tanggungjawab kita jadikan jaminan sebagai rasa tanggungjawab, hal ini memang tidak mudah untuk (UED-SP) Mitra Usaha dalam menghadapinya seperti rasa empati kepada anggota yang harus merelakan jaminan pasti ada, tapi kembali lagi ada konsekuensi terhadap pelaksanaan yang dilakukan ada timbal balinya karena pada awal ada perjanjiannya”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Karakteristik agen pelaksana (UED-SP)

Mitra Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UED-SP, pelaksanaan dapat berjalan secara efektif apabila pihak yang merasa terlibat dapat menjalankan program ikut adil secara tidak langsung dalam memberikan perhatian yang lebih kepada penungak.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dengan istilah Kondisi sosial, politik dan ekonomi keberhasilan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.

Jika Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar mengikuti prosedur yang sesuai maka (UED-SP) Mitra Usaha Desa Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu akan cepat memprosesnya. Untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari tanggapan Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar dengan indikator Kondisi sosial, politik dan ekonomi dilakukan menggunakan tiga item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.7: Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 di (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Mengenai Indikator Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Adanya keterkaitan simpan pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dengan ekonomi anggota	44	0	0	44

2	Adanya perbandingan antara umur, jenis kelamin, dan pekerjaan dalam simpan pinjam pada (UED-SP) Mitra Usaha	31	13	0	44
3	Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan	44	0	0	44
	Jumlah	119	13	0	132
	Rata-rata	40	4	0	44
	Persentase	90.2	9.8	0.0	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dengan indikator Kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar yaitu 40 orang atau 90.2%, jawaban responden berkategori terlaksana kemudian 4 orang atau 9.8%, berada pada kategori cukup terlaksana, serta tidak ada yang berada pada kategori kurang terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dari aspek Kondisi sosial, politik dan ekonomi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori terlaksana.

Kondisi terkait pandangan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar tentang Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha, maka penulis mewawancarai Kepala Desa (Kades) dari Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu

tanggal 3 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam memproses Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dari aspek Kondisi sosial, politik dan ekonomi adalah sebagai berikut :

“Sebenarnya Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha ini tidak membedakan dan tidak pula berdasarkan kasta kelas tinggi dan rendah akan tetapi pemerintah Desa dan Pihak (UED-SP) Mitra Usaha lebih mengedepankan sikap sosial dan empati yang tinggi yaitu Peminjam tergolong RTM (Rumah Tangga Miskin) asal memiliki usaha yang lebih diprioritaskan”.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Ketua (UED-SP) Mitra Usaha pada tanggal 3 Februari 2021 dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Dari kita sudah memberikan yang terbaik untuk anggota selebihnya apabila ada yang merasa kurang efektif dalam pelaksanaan yang kita berikan itu diluar kendali kita, Karena memang tidak mungkin kita meloloskan semua proposal tentu harus ada penyeleksian terlebih dahulu juga kita pertimbangan anggota yang bagaimana yang akan diloloskan hal ini semata agar tidak terjadi membengakan penungakan seperti yang terjadi sebelumnya, walaupun ada jaminan hal ini tetap akan merepotkan pihak kita pada akhirnya ”.

Pernyataan dari Ketua (UED-SP) Mitra Usaha diatas didukung oleh hasil wawancara peneliti pada Tata usaha, adalah sebagai berikut:

“Peminjam dan penungak sejauh ini masih dapat diatasi, karena bersipat jaminan. Karena pada saat perjanjian artinya anggota sudah mengetahui segala resiko yang akan terjadi apabila peminjam tidak dapat membayar angsuran tadi, tidak ada pemberlakukan khusus terhadap penungak semuanya kalau sudah menungak disini kita mintai”.

Senada dengan hasil wawancara peneliti kepada Staf analisis kredit yang bertugas sebagai penilaian kelayakan usaha calon peminjam, adalah sebagai berikut:

“Untuk apa pemberlakukan khusus kalau dianya menungak, kan perjanjian diawal sudah disepakati, berada dia usahanya jalan terus kenapa menungak kan itu yang

ditakutkan. Kita berikan pinjaman tidak pernah kita permasalahan umur, jenis kelamin dan pekerjaan. Karena dalam perjanjian harus ada pihak kedua si peminjam hal ini adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu dikemudian hari dan kita tidak memaksa memintai pembayaran pelunasan atau jaminan apabila peminjam tersebut lagi mendapat musibah”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan Kondisi sosial, politik dan ekonomi (UED-SP) Mitra Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UED-SP, yaitu tidak ada pemaksaan dalam pelaksanaan dan hanya berdasarkan hasil akhir atau penyeleksianlah yang dapat memberikan putusan akhir.

6. Disposisi implementor

Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dengan istilah disposisi implementor keberhasilan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu. Jika Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar mengikuti prosedur yang sesuai maka (UED-SP) Mitra Usaha Desa Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu akan cepat memprosesnya. Untuk mengetahui gambaran Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari tanggapan Anggota pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar dengan indikator disposisi implementor dilakukan menggunakan empat item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.8: Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 di (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar Mengenai Indikator Disposisi implementor

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Adanya pemahaman terhadap kebijakan (UED-SP) Mitra Usaha	34	5	5	44
2	Adanya (UED-SP) Mitra Usaha mempengaruhi anggota	31	13	0	44
3	Adanya komitmen (Perjanjian) antara peminjam dan (UED-SP) Mitra Usaha	32	12	0	44
4	Adanya sikap untuk berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam simpan pinjam di (UED-SP) Mitra Usaha	26	11	7	44
	Jumlah	123	41	12	176
	Rata-rata	31	10	3	44
	Persentase	69.9	23.3	6.8	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman di tahun 2020 dengan indikator disposisi implementor dalam (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar yaitu 31 orang atau 69.9%, jawaban responden berkategori terlaksana kemudian 10 orang atau 23.3%, berada pada kategori cukup terlaksana, serta 3 orang atau 6.8% berada pada kategori kurang terlaksana. Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Anggota yang

melakukan pinjaman di tahun 2020 dari aspek disposisi implementor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori terlaksana. Kondisi terkait pandangan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar tentang disposisi implementor yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha, maka penulis mewawancarai Kepala Desa (Kades) dari Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu tanggal 3 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam memproses Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dari aspek disposisi implementor adalah sebagai berikut :

“Peminjam dan (UED-SP) Mitra Usaha telah melakukan perjanjian dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, jadi yang artinya anggota sudah memahami segala kebijakan dari (UED-SP) Mitra Usaha, peminjaman murni dari diri mereka sendiri karena tidak dapat melibatkan orang lain pada saat perjanjian”.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Ketua (UED-SP) Mitra Usaha pada tanggal 3 Februari 2021 dengan pertanyaan yang sama beliau mengatakan bahwa:

“Sebaiknya untuk anggota dapat berbuat sesuai dengan aturan dari (UED-SP) Mitra Usaha, karena jika selama pelaksanaan pinjaman anggota melaksanakan sesuai aturan akan lebih mudah ditangani dan juga pihak kita tidak akan mempersulitkannya”.

Pernyataan dari Ketua (UED-SP) Mitra Usaha diatas didukung oleh hasil wawancara peneliti pada Tata usaha, adalah sebagai berikut:

“Pasti diberi arahan serta pemahaman anggota pada saat perjanjian simpan pinjam, juga menjadi kewajiban dari (UED-SP) Mitra Usaha untuk memberikan pemahaman kepada anggota yang melakukan pinjaman”.

Senada dengan hasil wawancara peneliti kepada Staf analisis kredit yang bertugas sebagai penilaian kelayakan usaha calon peminjam, adalah sebagai berikut:

“Pada saat dinyatakan lolos dalam penyeleksian anggota akan diberikan pemahaman seputar syarat dan ketentuan simpan pinjam dari (UED-SP) Mitra Usaha, tidak ada kita mempengaruhi anggota dan sebagainya hal ini mutlak hanya sebagai peminjam dan pengelola dari (UED-SP) Mitra Usaha saja”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan disposisi implementor (UED-SP) Mitra Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UED-SP, yaitu tidak ada pemaksaan dalam pelaksanaan karena diantara peminjam dan (UED-SP) Mitra Usaha sebelum melakukan perjanjian diberikan pemahaman terhadap resiko-resiko yang akan ditanggung apabila dikemudian hari mengalami penungakan. Untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai tanggapan responden terhadap variabel Pelaksanaan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tenganau Kabupaten Bengkalis, maka dapat hasil sebagai berikut:

7. Rekapitulasi Tanggapan Respoonden terhadap Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu

Untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai tanggapan responden terhadap variabel Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat hasil sebagai berikut:

Tabel V.9: Rekapitulasi Tanggapan Anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 di (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Standar dan sasaran kebijakan	40	4	0	44
		90.9	9.1	0.0	100
2	Sumberdaya	34	10	0	44
		77.3	22.7	0.0	100
3	Hubungan antar organisasi	26	9	9	44
		59.1	20.5	20.5	100
4	Karakteristik agen pelaksana	20	10	14	44
		45.5	22.7	31.8	100
5	Kondisi sosial, politik, dan ekonomi	40	4	0	44
		90.9	9.1	0.0	100
6	Disposisi implementor	31	10	3	44
		70.5	22.7	6.8	100
	Jumlah	191	47	26	264
	Rata-rata	32	8	4	44
	Persentase	72.3	17.8	29.7	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa pilihan responden terhadap semua indikator pada Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu, maka didapatkan bahwa 72.3% responden menjawab bahwa Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik, 17.8% responden menjawab bahwa Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana dengan cukup baik, dan 29.7% responden menjawab Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dengan tidak baik.

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka didapatkan bahwa tentang Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu terlaksana dengan baik, dengan 72.3% responden menyatakan dengan terlaksana. Artinya (UED-SP) Mitra Usaha telah terlaksana dengan baik untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar melalui simpan pinjam yang diberikan.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuisiner maka dapat dikatakan bahwa hambatan Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu tersebut adalah:

1. Anggota Gagal Dalam Menggunakan Dana UED-SP Karena Ekonomi anggota yang kurang baik

Karakteristik anggota UED-SP mempengaruhi dalam pengembalian dana yang dipinjamkan kepadanya tersebut. Anggota UED-SP dengan karakteristik yang baik dan sadar akan kewajibannya dalam pengembalian dana yang telah dipinjamnya itu ke UED-SP maka dalam penyetoran pengembalian tiap bulannya akan dibayarnya tepat waktu tanpa adanya tunggakan. Sementara anggota UED-SP Mitra Usaha yang memiliki karakteristik yang kurang baik dan tidak sadar akan kewajibannya dalam pengembalian dana.

2. Pengawasan Pengelola Terhadap Pelaksanaan UED-SP

Dalam pelaksanaan program ini peran petugas atau pengawas ini Sangat penting untuk kelancaran program tersebut, petugas atau pengawas diharapkan dapat saling bekerja sama agar untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan selesai dengan tepat waktu serta efisien dan efektif. Dalam kenyataannya pengawas lapangan jarang melakukan survey dan pengecekan terhadap para anggota UED-SP Mitra Usaha terkait dengan penungakan dan kendala dilapangan yang dihadapi para anggota.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu untuk hasil rekapitulasi tanggapan anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 dengan kategori “**Terlaksana**”.

Berikut kesimpulan dari anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu yakni sebagai berikut:

1. Untuk indikator standar (kriteria) dan sasaran kebijakan berada pada kategori terlaksana dan menunjukan bahwa dalam standar (kriteria) dan sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik yaitu diperuntukkan pada usaha ekonomi masyarakat yang membutuhkan dan juga terdapat penyeleksian proposal peminjaman dana UED-SP pada Mitra Usaha.
2. Untuk indikator sumberdaya yang diberikan oleh (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar berada pada kategori terlaksana dan menunjukan bahwa dalam segi sumberdaya

sudah sesuai dan baik dalam pelaksanaannya, walaupun terdapat beberapa anggota yang merasa kurang ditangani terkait dengan kinerja diberikan.

3. Untuk indikator hubungan antar organisasi pada (UED-SP) Mitra Usaha Desa Tanah Datar menurut anggota yang melakukan pinjaman Tahun 2020 berada pada kategori kurang terlaksana hal ini sebabkan karena kurangnya pemangku kepentingan dalam pembentukan (UED-SP) Mitra Usaha ikut dalam ambil peran didalamnya dan juga terdapat pernyataan dari beberapa anggota yang menjawab terlaksana dan kurang terlaksana.
4. Untuk indikator karakteristik agen pelaksana berada pada kategori kurang terlaksana dan menunjukan bahwa kurangnya keterlibatan pengawas lapangan dengan anggota yang menungak pada (UED-SP) Mitra Usaha, dan juga terdapat pernyataan dari beberapa anggota yang menjawab terlaksana.
5. Untuk indikator Kondisi sosial, politik dan ekonomi berada pada kategori terlaksana dan menunjukan bahwa memang adanya (UED-SP) Mitra Usaha dengan ekonomi anggota.
6. Untuk indikator disposisi implementor berada pada kategori terlaksana dan menunjukan bahwa memang adanya (UED-SP) Mitra Usaha berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku pada simpanan dan pinjaman dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tanah Datar, Kabupaten Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu.
7. Hambatan dalam pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mitra Usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu cukup serius, sehingga perlunya keseriusan dari (UED-SP) Mitra Usaha dalam perbaikan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan, hambatan-hambatan yang timbul diakibatkan karena gagalnya dalam menggunakan Dana UED-SP faktor yang disebabkan karena ekonomi anggota yang

kurang baik dan menimbulkan penungakan juga kurangnya pengawasan beserta ketegasan pimpinan dari (UED-SP) Mitra Usaha dalam melaksanakan disiplin kerja.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan bukan datang sepenuhnya dari kreditur akan tetapi juga datang dari (UED-SP) Mitra Usaha, oleh karena itu, seharusnya untuk pihak (UED-SP) Mitra Usaha lebih memperhatikan betul mana calon nasabah yang patut diberi pinjaman, dan mana yang seharusnya tidak diberikan pinjaman.
2. Perlunya pengawasan yang lebih baik seperti pengawasan lapangan dalam hal penungakan, pengawasan sebaiknya lebih terbuka kepada peminjam agar tau hambatan dan kendala dari pada peminjam, untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan (UED-SP) Mitra Usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu dalam organisasi diperlukan membangun kerjasama kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, S. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Bintoro, Tjokromidjojo. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Gunung Agung

Djarmiko, Dwi Riswan. 2016. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Djaman Satori & Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta

Hunger, J. David & Wheelen, Thomas L. 2012. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : Andi

Hadri, Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yokyakarta: Gajah Madapress

Kencana Inu. 2003. *System Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Kencana Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta: Jakarta

Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba

Manullang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Citra Pustaka

Miles, M. B, dan A. M. Herman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep Rohidi. Jakarta: Ui Pres

Moris and Zulkifli. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Moleong, L. 1995. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya

P.Siagian, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: BumiAksara

Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Rajagrafindo: Jakarta

Syafie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Syafie, Inu Kencana. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Zulkifli dan Moris A. Yogia. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 1366 /A_ UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Triya Lestari
Npm : 167110144
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
Mitra Usaha Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tanah Datar
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan hulu.
Persentase Plagiasi : 30 % (83 Halaman)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK: 970702230